




BULETIN DPRD KOTA MEDAN


Media Komunikasi dan Informasi DPRD Kota Medan



 dprd.pemkomedan.go.id

 Sekretariat DprdMedan

 humasdprdkotamedan

 Sekretariat DprdMedan

 @dprdmedan1



*Edisi
Januari - Maret
2022*





RDP Komisi III DPRD Kota Medan terkait 5 Pasar Belum Diserahterimakan

MEDAN - Komisi III DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Muhammad Afri Rizki Lubis, S.M., MIP., terkait 5 (lima) Pasar yang belum diserahterimakan Pemerintah Kota Medan ke Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, **Senin** (10/01/2022).

Muhammad Afri Rizki Lubis mengatakan bahwa ada aset PUD Pasar Kota Medan yang belum diserahterimakan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan kepada PUD Pasar Kota Medan.

Ada 5 pasar yang belum diserahterimakan dari Dinas Perkim kepada PUD Pasar Kota Medan. 5 pasar tersebut antara lain, Pasar Kampung Lalang, Pasar Marelان, Pasar Induk Tuntungan, Pasar Pringgan, Pasar Aksara. Kemudian ada beberapa keluhan pedagang seperti pedagang di Pasar Kampung Lalang mengeluh ada tangga yang belum bisa diperbaiki, karena belum diserahterimakan dari Dinas Perkim ke PUD Pasar, kata Muhammad Afri Rizki Lubis.

Selanjutnya, Muhammad Afri Rizki Lubis juga berharap dengan diserahterimakan aset dari Dinas Perkim Kota Medan ke PUD Pasar Kota Medan banyak inovasi-inovasi yang diciptakan untuk dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

DPRD Kota Medan berharap dengan diserahterimakan dari pihak Dinas Perkim ke PUD Pasar banyak Inovasi seperti halnya Pasar Marelان yang dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang diisi pedagang pasar, kemudian dari sore sampai malam hari dibuat seperti jajanan kuliner untuk meningkatkan PAD, tandas Ketua Komisi III DPRD Kota Medan.

Dengan diserahterimakan 5 (lima) Pasar tersebut ke PUD Pasar Kota Medan, diharapkan Dinas Perkim dapat melihat potensi lain dari pasar-pasar yang bisa meningkatkan PAD Kota Medan untuk dilakukan pembangunan, tutup Rizki.

 Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1

RDP Komisi 3 Terkait Pajak Penerangan Jalan

MEDAN - Komisi III DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Abdul Rahman Nasution, S.H., terkait Pajak Penerangan Jalan, yang dihadiri oleh Badan Pengelola Pajak, Retribusi Daerah Kota Medan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dan PT. PLN (Persero) Up. 3 Medan, **Senin** (10/01/2022).

Dalam pemaparannya, Abdul Rahman Nasution menjelaskan bahwa DPRD Kota Medan sangat mengapresiasi sinergi PLN dan OPD terkait dalam penerangan jalan di Kota Medan. DPRD Kota Medan sangat mengapresiasi telah memberikan penerangan jalan yg sangat baik untuk Kota Medan termasuk di lingkungan - lingkungan warga`, kata Abdul Rahman Nasution.

Selanjutnya, Abdul Rahman juga berharap kolaborasi kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi warga Kota Medan. Semoga kolaborasi hari ini bisa membawa manfaat yg baik bagi warga Kota Medan`, tandas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Medan. Agenda ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan.



Ketua Komisi I DPRD Kota Medan Berharap Wali Kota Awasi Pengangkatan Kepling



MEDAN - Forum Masyarakat Peduli Kecamatan Medan Denai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan terkait Pemilihan Kepala Lingkungan yang tidak sesuai Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan, **Senin** (17/01/2022).

Dalam tuntutanannya, Forum Masyarakat Peduli Kecamatan Medan Denai mendesak agar DPRD Kota Medan melakukan pengawasan terkait tidak transparannya pemilihan kepala lingkungan di lingkungan mereka, seperti contoh adanya pengangkatan kepala lingkungan yang ternyata tidak berdomisili di lingkungan tersebut. Setelah berorasi beberapa saat, akhirnya sejumlah perwakilan warga diterima Komisi I DPRD Kota Medan. Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto, S.Pd.I., mengatakan sudah disepakati dari awal bahwa Komisi I DPRD Kota Medan akan memanggil Kabag Tapem (Tata Pemerintahan) Setda Kota Medan, beberapa Camat dan Lurah untuk mendengar pengaduan masyarakat.

"Kami dari Komisi I DPRD Kota Medan sudah kita sepakati

dari awal sebelum kedatangan mereka bahwa besok hari **selasa** (18/01/2022) jam 2 (dua) siang, Komisi I akan memanggil Kabag Tapem, beberapa Camat dan Lurah untuk mendengar pendapat mereka tentang aduan-aduan masyarakat", kata Rudiyanto.

Rudiyanto juga menegaskan bahwa Komisi I DPRD Kota Medan sudah mengingatkan Kabag Tapem Setda Kota Medan, Camat dan Lurah untuk menjalankan proses pemilihan kepala lingkungan sesuai dengan Perwal No. 21 Tahun 2021. "Anggota Dewan Komisi I saya pastikan bahwa mereka sudah mengingatkan Camat, Lurah, dan Bagian Tapem untuk menjalankan proses pemilihan kepala lingkungan sesuai dengan Perwal No. 21 Tahun 2021", tegas Rudiyanto. Rudiyanto meminta agar Bagian Pemerintahan, Camat, Lurah harus mengawasi jalannya pemilihan Kepala Lingkungan di beberapa lingkungan agar sesuai dengan Perwal No. 21 Tahun 2022.

"Akan ada pemilihan Kepala Lingkungan, misalnya di Kec. Medan Tuntungan hari ini sudah masuk pemberkasan. Lagi-lagi kami meminta Bagian Tapem, Camat dan Lurah untuk

mengawasi jalannya pemilihan Kepala Lingkungan yang dilaksanakan di beberapa lingkungan sesuai Perwal No. 21 Tahun 2022. Kalau tidak ya gini-gini terus", kata Rudiyanto. Ketua Komisi I DPRD Kota Medan juga berharap agar Wali Kota Medan juga ikut mengawasi proses pemilihan Kepala Lingkungan di Kota Medan.

"Saudara Wali Kota juga harus turun tangan dan awasi betul-betul permasalahan ini. Kita khawatir kredibilitas Wali Kota turun hanya gara-gara ini. Saya menganut paham bahwa tidak ada prajurit yang salah, yang salah Pimpinan yang tidak bijaksana", tutup Rudiyanto. Audiensi ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran Kantor DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan.

Komisi 1 DPRD Kota Medan • Hindari Kekisruhan Pengangkatan Kepling, Perwal No. 21 Tahun 2021 harus dilaksanakan dengan baik

MEDAN - Komisi I DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, **Selasa** (18/1/2022). RDP ini langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto, S.Pd. I., dan berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Medan. RDP ini untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari hasil Rapat Bersama Forum Masyarakat Peduli Kecamatan Medan Denai, Medan Labuhan, dan Medan Kota pada hari **Senin** (17/1) kemarin mengenai Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dihadiri oleh Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Medan, Camat Medan Labuhan, Camat Medan Denai, Camat Medan Barat, Camat Medan Kota, Lurah Kelurahan Tegal Sari Mandala I, II, dan III, Lurah Kelurahan Pasar Merah Barat, Lurah Kelurahan Bandar Selamat, dan Lurah Kelurahan Denai. Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, S.H., mengatakan bahwa duduk perkara dari aspirasi masyarakat mengenai pengangkatan Kepala Lingkungan adalah dari proses atau tahapan verifikasi data faktual calon Kepala Lingkungan yang mendaftar.

"Kalau menurut saya, kesalahan atau duduk perkaranya ada pada proses verifikasi data faktual dari calon Kepala Lingkungan itu. Kepala Lingkungan yg terpilih haruslah sesuai hajat hidup, yg bisa melayani masyarakat", kata Mulia Syahputra Nasution. Sedangkan anggota Komisi I yang lain, Roby Barus, S.E., menyebutkan kurangnya sosialisasi pendalaman

tentang mekanisme proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan di setiap lingkungan, sehingga pada prosesnya belum sesuai Perwal No.21 Tahun 2021.

"Saya rasa Perwal No. 21 Tahun 2021 ini kurang disosialisasikan kepada pemangku jabatan di Kecamatan dan Kelurahan, seperti disebutkan tadi bahwa adanya ujian dalam pengangkatan Kepala Lingkungan, padahal di Perwal No. 21 Tahun 2021 tidak ada ujian. Kalau ada ujian, tentu ada anggarannya. Artinya belum serentak pemahaman terhadap Perwal ini", sebut Roby Barus. Sedangkan, Mulia Asri Rambe, S.H., juga menambahkan bahwa syarat mutlak yang tidak boleh dikesampingkan dalam pengangkatan Kepala Lingkungan adalah usia, tamatan pendidikan, dan domisili dari calon Kepala Lingkungan tersebut.

"Syarat mutlak yang tidak boleh dikesampingkan yang pertama soal pendidikan, minimal tamatan SLTA/SMA, kedua usia minimal 23 sampai dengan 55 tahun, dan ketiga domisili, dimana calon harus minimal 2 (dua) tahun berdomisili di lingkungan tersebut. Artinya orang yang bukan warga atau tidak berdomisili di lingkungan tersebut tidak bisa mendaftar. Ini syarat wajib karena peraturan ini Wali Kota yang buat, kalau dilanggar berarti kita bertentangan dengan Wali Kota", tegas Mulia Asri Rambe. Usai berlangsungnya RDP tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto, S.Pd.I., menyimpulkan bahwa dalam RDP ini Komisi I DPRD Kota Medan memberikan masukan kepada Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Medan dalam hal pengawasan yang lebih kuat terhadap Perwal No. 21 Tahun 2021, kemudian terhadap Pamong

adanya laporan yang bersikap kurang sopan terhadap warganya.

"Dalam RDP ini kami Komisi I memberikan masukan kepada Kabag Tapem, pertama dalam hal pengawasan yang lebih kuat terhadap Perwal No. 21 Tahun 2021. Kedua, karena banyaknya masukan tentang Pamong yang katanya bersikap arogan dan kurang santun terhadap warga. Dan yang ketiga, harus ada komunikasi yang baik antara Komisi I dengan Tapem, Camat beserta Lurah", kata Rudiyanto. Rudiyanto juga berharap agar ke depannya pelaksanaan Perwal No. 21 Tahun 2021 dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan di lingkungan-lingkungan di Kota Medan.

"Kita berharap pelaksanaan Perwal No. 21 Tahun 2021 ini dilaksanakan dengan baik. Jangan ada lagi hal-hal yang akhirnya menimbulkan kekisruhan di lingkungan-lingkungan di Kota Medan. Apalagi tadi disebutkan ada beberapa Kecamatan akan melaksanakan pemilihan Kepala Lingkungan mulai dari bulan Januari sampai April 2022", tandas Ketua Komisi I DPRD Kota Medan.



Sekretariat DPRD Kota Medan kembali Melaksanakan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster)



MEDAN - Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster), Sekretariat DPRD Kota Medan kembali melaksanakan vaksinasi dosis lanjutan (Booster) di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kota Medan, **Selasa** (25/01/2022).

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 24 sampai 25 Januari 2022.

Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., mengatakan vaksinasi dosis lanjutan (Booster) tersedia sebanyak 200 dosis dan diberikan untuk Anggota DPRD Kota Medan, seluruh ASN dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

"Hari ini kita melaksanakan vaksinasi ketiga yaitu Booster terhadap keluarga di Sekretariat DPRD Kota Medan termasuk Anggota DPRD beserta seluruh staf di Sekretariat DPRD Kota Medan yang telah melakukan vaksinasi dosis kedua. Terdapat 200 dosis yang disediakan selama 2 (dua) hari", kata Ali Sipahutar.

Ali Sipahutar berharap bahwa vaksinasi lanjutan (Booster) yang dilaksanakan ini berguna untuk memberikan imunitas yang lebih sehingga dapat mencegah dan meminimalisir dari mutasi virus Covid-19 terbaru yaitu Omicron.

"Kita berharap vaksin ketiga ini berguna untuk memberikan imunitas yang lebih bagi penerimanya untuk meminimalisir virus Covid-19 terbaru yaitu Omicron", tutup Ali Sipahutar.



MEDAN - Banyaknya laporan dan keluhan warga mengenai bangunan yang menyalahi aturan, Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya beserta perwakilan warga di Ruang Rapat Badan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan, **Selasa** (25/01/2022). Menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, D. Edy Eka Suranta S. Meliala, mengatakan bahwa RDP hari ini membahas beberapa permasalahan terkait bangunan yang tidak sesuai aturan.

"Ada beberapa permasalahan hari ini, yang pertama ada pagar bangunan yang dibangun di atas lahan dimana menurut pemilik lahan berada di lahan beliau, sehingga terjadi sedikit masalah karena mengingat bahwa pemilik lahan memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) yang resmi namun dibangun pagar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adanya perumahan di Kecamatan Medan Helvetia, yang dalam perizinannya

Dinas Perizinan mengeluarkan izin sejumlah 36 (tiga puluh enam) unit bangunan tapi menurut pemantauan di lapangan, walaupun belum dibangun tapi sudah dibuat batas-batas sejumlah 44 (empat puluh empat) unit. Kita minta kepada Dinas Perizinan supaya memantau ulang, jika memang dibangun 44 (empat puluh empat) unit akan terjadi kerugian PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Selanjutnya Edy Eka Suranta menambahkan adanya permasalahan mengenai perizinan yang ada di jalan Ir. H. Juanda mengenai bangunan yang akan dibangun Food Court (pusat kuliner). Informasi yang didapat Dinas Perizinan belum mengeluarkan izin, masih hanya berupa resi, tapi pemantauan di lapangan pembangunan sudah mencapai 70 (tujuh puluh) persen. "Kami minta kepada dinas terkait untuk memantau perizinan di lokasi

tersebut yang merupakan sudut jalan, walaupun bangunan itu belum selesai tapi sudah terjadi kemacetan di daerah tersebut", tambah Edy Eka Suranta.

Edy Eka Suranta juga berharap seluruh OPD terkait yang menangani permasalahan perizinan bangunan agar saling bersinergi dalam memantau bangunan-bangunan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami menghimbau dan berharap kepada seluruh OPD terkait untuk memantau perizinan dan mengevaluasi dengan ketat, atau bila perlu mengeluarkan izin ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) sehingga program Wali Kota Medan supaya Medan tanpa macet dapat kita raih", tandas Edy Eka Suranta. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu, S.H.



Komisi 4 DPRD Kota Medan menghimbau awasi dan evaluasi dengan ketat perizinan bangunan yang menyalahi aturan



Ketua DPRD Kota Medan : Diharapkan Jemaat HKBP Distrik X Medan Aceh Bisa Menjadi Agen Perubahan untuk Kebaikan

MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menghadiri Syukuran Awal Tahun Baru 2022 HKBP Distrik X Medan Aceh, **Rabu** (26/01/2022).

Dalam kegiatan ini, turut hadir Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., para tokoh agama dan tokoh masyarakat Dr. Drs. R. E. Nainggolan, M.M., dan Kombes. Pol. Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., beserta para Jemaat HKBP Distrik X Medan Aceh.

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan

mengatakan bahwa tetap berupaya mendukung program-program Pemerintah Kota Medan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa melihat etnis budaya dan agama.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan karena virus Covid-19 belum usai, kami berupaya agar program-program P e m k o M e d a n d a p a t mensejahterakan masyarakat tanpa pandang bulu, pandang etnis budaya dan agama`, kata Bobby.

Sementara, Ketua DPRD Kota Medan berharap dalam ibadah syukuran tahun baru 2022 ini, kiranya para Jemaat HKBP Distrik X Medan Aceh dapat menjadi agen damai, agen perubahan yang memberikan kebaikan dan cinta kasih Kristus.

Melalui ibadah syukuran tahun baru 2022 ini, saya mengajak kita semua untuk bangkit menjadi agen damai, agen perubahan yang memberikan kebaikan dan cinta kasih Kristus, sebagaimana Allah tidak membedakan kasihnya dan kasih-Nya ditujukan kepada semua umat manusia`, kata Hasyim.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan Ulos dari Pengurus HKBP Distrik X Medan Aceh kepada Wali Kota Medan dan Ketua DPRD Kota Medan, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.

Acara ini berlangsung di halaman Gereja HKBP Distrik X Medan Aceh.



Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penutupan Jalan Nippon dan Proyek Drainase



MEDAN - Menanggapi banyaknya laporan dan keluhan warga mengenai bangunan yang menyalahi aturan, Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Camat Medan Marelان, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Dalam RDP ini juga hadir sejumlah perwakilan warga, **Senin** (31/01/2022).

RDP ini dipimpin oleh Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan didampingi oleh anggota-anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan lainnya.

Dalam RDP tersebut Komisi 4 DPRD Kota Medan mengangkat 2 (dua) masalah yang ada di masyarakat, yaitu penutupan Jalan Nippon/Takenaka, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan dan proyek drainase di area Masjid Al-Ishlah di Jalan Sei Belutu, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

"RDP hari ini mengenai Jalan Nippon/Takenaka yang ditutup pakai portal. Jadi ada masyarakat yang keberatan adanya portal yang menutup jalan umum itu. Ke depannya kami menegaskan tidak boleh ada portal-portal dipasang yang tidak mempunyai izin. Kalau dibiarkan nanti semakin banyak yang menutup akses jalan umum di Kota Medan", kata Paul Mei Anton.

Selain itu Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu, S.T., juga menyebutkan adanya pengaduan atau keluhan masyarakat di Sei Belutu tentang pembangunan drainase di sepanjang Jalan Sei Belutu, Kecamatan Medan Selayang.

"RDP hari ini salah satunya mengenai pengaduan warga masyarakat Sei Belutu tentang pembangunan drainase di sepanjang Jalan Sei Belutu, Kecamatan Medan Selayang khususnya di depan salah satu tempat ibadah yaitu Masjid yang memang membuat kurang nyaman untuk kegiatan ibadah," kata Renville Napitupulu.

Disini Renville Napitupulu juga menambahkan tentang adanya laporan warga terkait adanya keterlambatan kerja oleh pihak kontraktor, sehingga pembangunan drainase menjadi lebih lama.

"Pembangunan drainase ini menggunakan sistem yang baru yaitu sistem U-Ditch. Jadi ini memang akibat rangkaian dari pekerjaan 2021 yang pada saat itu Kepala Dinasnya masih Plt (Pelaksana Tugas). Jadi pembangunan sistem drainase baru pertama kali diterapkan dengan sistem U-Ditch, jadi benar-benar perlu perencanaan sehingga terjadi keterlambatan kerja oleh kontraktor", tutup Renville Napitupulu.

Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Koordinasi dengan Plt. Kabag Hukum dan Kasat Pol-PP Kota Medan

MEDAN - Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Koordinasi dengan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Rudiyanto, S.Pd.I., **Senin** (31/01/2022).

Rudiyanto menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi ini merupakan silaturahmi awal dengan Plt. Kabag Hukum Setda Kota Medan dan Kasatpol PP Kota Medan untuk kinerja ke depan.

"Ini bertujuan mengetahui, yang pertama tentang siapa Plt Kabag Hukum Setda Kota Medan yang baru dan Kasat Pol-PP Kota Medan.

Kemudian yang kedua, Anggota Dewan berharap kepada kabag hukum yang baru ini dapat

menyelesaikan persoalan2 misalnya Perda (Peraturan Daerah) yang dimungkinkan akan ada petunjuk teknis berupa Perwal (Peraturan Walikota)", kata Rudiyanto.

Dalam kesempatan ini Rudiyanto juga berharap Kasat Pol-PP bisa menjadikan Polisi Pamong Praja yang humanis ke depannya.

"Kita berharap dibawah Kasatpol PP Pak Rakhmat ini bisa menjadikan Satpol PP yang humanis, karena anggapan warga selama ini Satpol PP seperti tentara. Jadi harapan ke depan tidak ada lagi kekerasan dalam penegakan hukum dengan warga", tandas Rudiyanto.

Rapat Koordinasi ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Komisi 1 DPRD Kota Medan Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Inspektorat dan Kesbangpol Kota Medan

MEDAN - Komisi 1 DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Inspektorat Kota Medan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, **Senin (07/02/2022)**.

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, S.H, M.H., mengatakan tujuan Rakor dengan Inspektorat Kota Medan agar memperkuat pengawasan dan pengauditan.

"Rapat hari ini dengan Insepktorat Kota Medan supaya diperkuat pengawasan dan juga pengauditan kepada seluruh internal yang ada di Pemerintah Kota Medan supaya bisa memperbaiki kinerja", kata Mulia Syahputra.

Selain itu, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan lainnya, Edi Saputra, S.T., mengatakan Kesbangpol sebagai magnet dalam menjaga kondusifitas masyarakat Kota Medan.

"Titik tekan kami bagaimana Kesbangpol sebagai magnet dalam menjaga kondusifitas masyarakat Kota Medan, karena salah satu tugasnya mengelola elemen-elemen OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda), ORMAS (Organisasi Masyarakat), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan kelompok masyarakat lainnya.

Kami berharap bagaimana peran dan fungsi Kesbangpol sebagai magnet tadi, bila perlu hal-hal yang perlu dibantu oleh Komisi 1 untuk menunjang kinerja dalam hal anggaran, kami siap !!", kata Edi.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.



Ranperda Kota Medan tentang Penyandang Disabilitas dan **UMKM**



MEDAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, dan Bagian Hukum Setda Kota Medan, **Senin (07/02/2022)**.

Rapat Ranperda Kota Medan ini terkait tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kota Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan, tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.

Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M., mengatakan ada 25 (dua puluh lima) Ranperda yang sudah ditetapkan bersama Pemerintah Kota Medan, salah satunya tentang Perlindungan Terhadap Disabilitas dan Lansia di Kota Medan, dan Perlindungan dan Pengembangan UMKM.

"Dari 25 (dua puluh lima) Ranperda yang telah diparipurnakan, tentu kita harus urutkan lagi, mana yang lebih awal akan jadi pembahasan kita termasuk salah satunya mengenai penyandang disabilitas dan pengembangan UMKM.

Kita lihat prioritas untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi, baik sarana maupun prasarana. Medan sebagai kota metropolitan, kota yg maju, saya pikir itu harus kita persiapkan. Juga termasuk UMKM, karena banyak usaha-usaha yang terdampak Covid-19 ini juga jadi perhatian kita sehingga kita harus lahirkan Perda (Peraturan Daerah) yang menjadi perlindungan dan pembinaan kepada pelaku UMKM", kata Edwin.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana



Komisi 2 DPRD Kota Medan Gelar RDP terkait Permasalahan Ketenagakerjaan

MEDAN - Menanggapi adanya pengaduan masyarakat terkait ketenagakerjaan, Komisi 2 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara, PT. Belawan Deli Chemical Industri, PT. Coca Cola Amatil Indonesia, PT. Usaha Berkah Amanah, beserta perwakilan pekerja, **Senin** (07/02/2022).

RDP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Sudari, S.T., dan berlangsung di Ruang Rapat Komisi 2 DPRD Kota Medan.

Sudari mengatakan ada 2 (dua) permasalahan terkait pengaduan masyarakat, yaitu permasalahan antara PT. Belawan Deli Chemical Industri dengan Rinaldi Lubis sebagai Security, dan antara PT. Coca Cola Amatil Indonesia dengan PT. Usaha Berkah Amanah.

"Kami dari Komisi 2 menerima pengaduan masyarakat, yang pertama antara Rinaldi Lubis sebagai Security dengan PT. Belawan Deli Chemical Industri. Permasalahannya saudara Rinaldi diberhentikan karena tidak mau mengikuti aturan perusahaan yaitu adanya rotasi. Setelah dilakukan mediasi, yang bersangkutan kembali dipekerjakan dengan catatan meminta maaf dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan selagi tidak melanggar normatif", kata Sudari.

"Persoalan yang kedua yaitu antara karyawan dengan PT. Usaha Berkah Amanah sebagai perusahaan alih daya yang bekerja di PT. Coca Cola. Permasalahannya PT. Coca Cola memutuskan kontrak kerja dengan PT. Usaha Berkah pada bulan Maret 2020, ternyata karyawan yang ada disitu kontrak kerjanya dari Januari sampai dengan Desember 2020, jadi ada sisa kontrak 9 (sembilan) bulan lagi. Sesuai dengan aturan, karyawan yang sudah bekerja 5 (lima) tahun agar diberi uang pisah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021. Setelah kami mediasi, kami memberikan kesempatan kepada PT. Usaha Berkah untuk berdiskusi dengan manajemen agar dapat memberi win-win solution terhadap karyawan yang menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)", tambahnya.

Sudari berharap dengan dilakukannya mediasi dari kedua belah pihak, permasalahan yang terjadi tidak sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial.

"Setelah mediasi ini apa yang kami harapkan bisa terjadi sehingga tidak sampai kepada pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial", tandas Sudari.



Hendri Duin Pedagang Kecil Harus Dilindungi

MEDAN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan melaksanakan Lanjutan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan, **Selasa** (08/02/2022).

Rapat ini dipimpin oleh Ir. Hendri Duin, selaku Ketua Pansus DPRD Kota Medan, dengan menghadirkan Dinas Perdagangan Kota Medan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, PUD Pasar Kota Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

Hendri mengatakan prioritas Ranperda ini adalah perlindungan terhadap pedagang kecil, oleh karenanya Pansus DPRD Kota Medan bekerja sama dan bersinergi dengan OPD terkait.

"Pedagang kecil itu dilindungi, itu prioritas kita. Banyak pedagang kecil yang berdagang di zona merah, kita gusur tapi tempat tidak ada, kan kasihan. Maka kami bekerja sama dan bersinergi dengan PUD Pasar, Kecamatan, dan OPD terkait untuk direlokasi. Tujuannya supaya pedagang dilindungi", kata Hendri

Hendri menambahkan, sebelum Ranperda disahkan para pedagang harus dilindungi dan harus ada jaminan.

"Sebelum kita sahkan, kita berharap para pedagang itu dilindungi, jangan hari ini dipindahkan, besok dipindahkan, itu juga yang kita lihat. Nanti setelah relokasi harus ada jaminan, jadi harus ada regulasi hukum sebagai jaminan pedagang relokasi untuk tetap dapat tempat, itu yang kita inginkan. Jadi prioritasnya itu", tambahnya.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No, 1, Medan.



Kegiatan Audiensi Terkait TPP Pengawas Sekolah SD dan SMP mengadu ke Wakil Ketua DPRD Kota Medan

MEDAN - Menyikapi keluhan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., menerima pengaduan dari Pengawas Sekolah Tingkat SD dan SMP se-Kota Medan di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, **Senin** (14/02/2022).

Rajudin mengatakan ada beberapa keluhan yang disampaikan Pengawas Sekolah yang harus menjadi perhatian Pemerintah, antara lain sudah 8 (delapan) tahun Pengawas Sekolah tidak mendapatkan TPP.

"Ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh Pengawas Sekolah antara lain, yang pertama sejak delapan tahun yang lalu Pengawas tidak mendapatkan TPP. Mereka mengeluh, sementara beban kerja mereka semakin banyak. Contoh satu pengawas bisa mengawasi lebih dari tiga sekolah bahkan sampai lima sekolah, nah ini sangat miris. Kemudian yang kedua, selama ini mereka dapat uang makan, kalau dari Kemenag mereka dapat, tapi yang dari Diknas tidak dapat, selanjutnya yang ketiga, adanya Kepala Sekolah yang tumpang tindih tugas di sekolah lain, artinya ada Kepala Sekolah yang di Plt-kan di sekolah lain", kata Rajudin.

Rajudin menyampaikan akan ada solusi dan tindak lanjut supaya fungsi pengawas betul-betul dijalankan dan keluhan terkait TPP pengawas dapat dicari jalan keluarnya.

"Akan kita buat solusinya nanti supaya ke depan pengawas betul-betul difungsikan, mana yang sudah sertifikasi dan mana yang belum, diupayakan yang belum sertifikasi akan kita prioritaskan untuk TPPnya, sehingga tidak membebani APBD kita. Selanjutnya akan kita buat RDP (Rapat Dengar Pendapat), dan saya upayakan dalam waktu dekat nanti saya panggil dinas terkait, Dinas Pendidikan, Komisi 2 yang membidangi pendidikan supaya nanti lebih jelas bahwa inilah kejadian selama ini, dan ini harus segera diantisipasi dan menjadi perhatian kita", tandas Rajudin.



Audiensi Finalis Puteri Indonesia 2022 Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ke Ketua DPRD Kota Medan

MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menerima audiensi dari Finalis Puteri Indonesia Perwakilan Sumatera Utara 2022, Sarah Pia Desideria Pandjaitan di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, **Kamis** (17/02/2022).

Dalam pertemuannya, Hasyim berharap dengan adanya Perwakilan Sumatera Utara di ajang kontes Putri Indonesia 2022 dapat menjadi sejarah baru perwakilan dari Sumatera Utara khususnya Kota Medan bisa menjadi juara nasional.

"Kita sangat menyambut baik kehadiran dari Finalis Puteri Indonesia 2022 Perwakilan

Sumatera Utara. Saya berharap ada nantinya sejarah baru perwakilan SUMUT khususnya Kota Medan menjadi juara nasional. Saya melihat latar belakang Sarah Pandjaitan cukup bagus, baik dari pengalaman yang pernah menjadi runner up Puteri Sumatera Utara, dan pernah mendapatkan penghargaan di India, kemudian dari kecerdasan, kegiatan sosial dan keahlian yang dia miliki, saya melihat ada peluang dan potensi yang besar untuk menjadi juara nasional", kata Hasyim.

Hasyim menghimbau agar seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya warga Kota Medan memberikan doa dan dukungan untuk Sarah Pandjaitan sebagai perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022.

"Sudah sepantasnya kita masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan mendukung sepenuhnya Sarah Pandjaitan ikut di ajang nasional dan menjadi juara pertama Puteri Indonesia 2022. Jadi nanti ada satu kebanggaan bagi warga Kota Medan bahwa ada putri daerah yang menjadi juara nasional yang berdomisili di Kota Medan", tutup Hasyim.





H.T. Bahrumsyah Berharap MTQ ke-55 Kota Medan Dapat Mewarnai Wajah Umat Islam yang Damai dan Membumikan Al Quran

MEDAN - Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah, S.H., M.H., menghadiri acara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-55 Tingkat Kota Medan Tahun 2022 di Gedung OB Sya'af Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah Nomor 1 Kecamatan Medan Belawan, **Jumat** (18/02/2022).

MTQ Ke-55 ini dibuka langsung oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., yang diawali dengan pemukulan beduk tanda dimulainya MTQ Ke-55 Tingkat Kota Medan Tahun 2022.

Pembukaan MTQ Ke-55 Tahun 2022 juga ini dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., unsur Forkopimda Kota Medan diantaranya, Danlantamal I Belawan Kolonel Laut (P) Johannes Djanarko Wibowo, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal Rahmat, Kakan Kemenang Kota Medan, Impun Siregar, Ketua LPTQ Kota Medan, Palid Muda Harahap, serta para pemimpin tinggi lainnya.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan agar MTQ ke-55 Tingkat Kota Medan ini dapat melahirkan Qori dan Qoriah yang berkualitas yang mampu membawa nama harum Kota Medan ke ajang MTQ yang lebih tinggi lagi tingkatannya.

"Pesan ini selalu saya sampaikan agar para Pengawas dan Hakim dapat berlaku jujur dan adil dalam memberikan nilai kepada para peserta sehingga nantinya akan muncul Qori dan Qoriah kota Medan yang berkualitas," kata Bobby Nasution.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah, S.H.,M.H., berharap kegiatan MTQ yang dilaksanakan ini dapat mewarnai wajah umat islam yang damai dan dapat membumikan Al-Qur'an.

"MTQ yang telah membudaya di tengah masyarakat tidak hanya meningkatkan dari segi syiar dan kualitas penyelenggaraannya saja, namun kegiatan ini harus dapat mewarnai wajah umat islam yang damai di Kota Medan, dan harus mampu membumikan Al-Qur'an sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dapat dipahami dan dilaksanakan umat islam", kata Bahrumsyah.

Peserta MTQ Ke-55 ini diikuti oleh 647 Qori dan Qoriah yang merupakan utusan dari 21 Kecamatan se-Kota Medan, dimana para peserta tersebut akan mengikuti 9 kategori cabang yang akan diperlombakan dan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 25 Februari 2022.



Terkait Masalah Pasar Marelان, Komisi 3 DPRD Kota Medan melaksanakan RDP dengan P3TM dan PUD Pasar Kota Medan

MEDAN - Menindaklanjuti pengaduan dari Pengurus Persatuan Pedagang Tradisional Medan (P3TM) terkait masalah Pasar Marelان, Komisi 3 DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan, **Selasa (22/02/2022)**.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, RDP ini dihadiri oleh Dirut PUD Pasar Kota Medan, Perwakilan P3TM, serta perwakilan pedagang Pasar Marelان.

RDP ini dipimpin oleh Anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan, Ir. Hendri Duin, didampingi Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, Abdul Rahman Nasution, S.H., dan Hj. Netty Juniaty Siregar.

Hendri Duin mengatakan bahwa duduk permasalahan adalah perihal antara hak dan kewajiban dari P3TM dengan pihak PUD Pasar Kota Medan.

"Pihak P3TM yang merupakan perwakilan dari pedagang meminta kejelasan yang mana keluhannya ada hak-haknya yang belum diterima, sementara kewajibannya ada yang belum dikerjakan. Jadi wajar pihak PUD Pasar belum memberikan hak mereka", kata Hendri.

Hendri berharap ke depannya antara P3TM dengan PUD Pasar saling bersinergi dalam mengelola Pasar Marelان.

"Jadi untuk ke depannya kita bersinergi antara PUD Pasar dengan P3TM dan dapat duduk kembali setelah hasil kunjungan sidak Komisi 3 DPRD ke lapangan. Supaya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di lapangan, nanti kita cari solusinya bagaimana P3TM dan PUD Pasar bersinergi dengan baik", tandas Hendri.



Hendri Duin Medan Tertata Indah dan Rapi dengan Tidak Menjamurnya PKL

MEDAN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan melaksanakan Lanjutan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan, **Selasa** (22/02/2022).

Rapat ini dipimpin oleh Ir. Hendri Duin, selaku Ketua Pansus DPRD Kota Medan, dengan menghadirkan Dinas Perdagangan Kota Medan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, PUD Pasar Kota Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

Hendri mengatakan konsep OPD terkait dalam menyusun Ranperda untuk PKL sama dengan konsep Pansus yang memikirkan dan peduli dengan PKL.

"Saya melihat mereka para OPD sangat antusias, memiliki rasa yang dalam untuk para pedagang. Jadi konsep mereka sama dengan Pansus, yaitu menghargai PKL, memanusiakan pedagang, jangan digusur-gusur saja, harus ada relokasi tempat. Jadi poin-poin itu yang kami tangkap, sepaham, sependapat dengan Pansus", kata Hendri.

Hendri berharap dengan disusunnya Ranperda tentang Penetapan Zonasi PKL, Kota Medan dapat tertata indah dan rapi.

"Saya berharap dengan tersusunnya Ranperda Penetapan Zonasi PKL, Kota Medan tertata indah dan rapi dengan tidak menjamurnya pedagang kaki lima sembarangan", tutupnya.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan.

Rapat BAPEMPERDA DPRD Kota Medan tentang RANPERDA Kota Medan



M E D A N - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Medan di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan, **Selasa** (01/03/2022).

Dengan menerapkan protokol kesehatan, Rapat Ranperda ini dipimpin oleh Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M., dengan menghadirkan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, Bagian Hukum Setda Kota Medan, dan para OPD terkait lainnya.

Rapat Ranperda Kota

Medan ini terkait tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kota Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan, tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, dan tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Edwin mengatakan bahwa Rapat Bapemperda ini untuk melihat apakah Ranperda ini sudah bisa masuk ke tahap pembahasan baik di Bapemperda maupun pembahasan Pansus (Panitia

Khusus) DPRD kota Medan.

"Tentunya pertemuan ini kita lakukan untuk melihat apakah Ranperda ini sudah bisa masuk ke tahap pembahasan, baik itu pembahasan di Bapemperda sendiri ataupun mungkin akan kita dorong ke dalam Pansus DPRD Kota Medan. Pertemuan hari ini adalah pengharmonisasian terkait Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD Kota Medan. Tadi kita mendapatkan beberapa masukan-masukan baik dari OPD terkait maupun Kemenkumham, dengan masukan-masukan tadi kita berharap akan lahir Perda yang tentu bisa memberi manfaat baik untuk masyarakat maupun Pemerintah Kota Medan", kata Edwin.



RAPAT KOORDINASI KOMISI 1 DPRD KOTA MEDAN DENGAN BAGIAN UMUM SETDA KOTA MEDAN

MEDAN - Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Koordinasi dengan Bagian Umum Setda Kota Medan di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Medan, **Senin (07/03/2022)**.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, rapat koordinasi ini dipimpin DPRD Kota Medan, Rudiyanto, S.Pd.I., dan dihadiri Kepala Bagian Medan dan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan lainnya.

oleh Ketua Komisi 1
Umum Setda Kota

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T., mengatakan bahwa rapat koordinasi ini terkait masalah kinerja dan fungsi Bagian Umum Setda Kota Medan.

"Rapat koordinasi ini terkait masalah kinerja dan fungsi dari Bagian Umum, yang pertama pengadministrasian termasuk surat masuk dan surat keluar dari masyarakat, kemudian tindak lanjutnya dan hasilnya. Yang kita evaluasi pertama tidak teradministrasi dengan baik, tidak ter-follow up dengan baik, hasilnya juga sering tidak diketahui", kata Edi.

Dalam kesempatan ini Edi Saputra juga berharap ke depannya Bagian Umum Setda Kota Medan dapat memiliki kinerja yang baik.

"Kita berharap bagaimana Bagian Umum ini dapat menjadi pipa penyambung yang dapat mengalirkan air dengan baik ke tujuan yang dituju, tidak sumbat-sumbat, sehingga aliran itu bisa lancar. Jadi intinya kami berharap Bagian Umum dapat memiliki kinerja dan fungsi yang lebih baik lagi untuk ke depannya", tandas Edi.



Masyarakat Masih Keluhkan Permasalahan Infrastruktur, Kebersihan dan Banjir di Kota Medan



MEDAN - Masyarakat masih mengeluhkan permasalahan infrastruktur, kebersihan dan banjir di Kota Medan. Hal ini terungkap saat DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda "Penyampaian Laporan Hasil Reses Kesatu Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2022 dari Daerah Pemilihan 1 s/d 5", **Senin** (14/03/2022).

Rapat Paripurna yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dan H.T. Bahrumsyah S.H., M.H., dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Arahman, M.M., Anggota Dewan, dan segenap Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Medan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

Dalam penyampaian laporan hasil reses dari 5 (lima) daerah pemilihan tersebut, banyak keluhan masyarakat yang diterima oleh Anggota DPRD Kota Medan, seperti permasalahan infrastruktur (perbaikan dan pelebaran jalan, drainase, pembuatan dan perbaikan pintu air, penerangan jalan), masalah pelayanan kesehatan (pemberian BPJS bagi warga yang tidak mampu,

pengecangan stunting bagi balita, bantuan untuk penyandang disabilitas dan lansia), serta masalah administrasi (penerbitan KIA, pengurusan KIP, permohonan izin UMKM, akte kelahiran dan administrasi lainnya).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman, S.E., mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan menyadari bahwa di dalam mengatasi pembangunan kota perlu adanya kolaborasi dan sinergi antar lembaga.

"Saya berharap kemitraan eksklusif-legislatif, kebersamaan, serta partisipasi yang luas dari seluruh pemangku kepentingan kota harus terus kita optimalkan. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh hasil yang disampaikan merupakan aspirasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Kota Medan yang semakin baik", kata Aulia Rachman.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga, S.E., M.M., mengatakan, bahwa hasil reses masih dengan persoalan infrastruktur jalan, drainase, kebersihan, terutama masalah banjir.

"Kita berharap temuan yang didapat di lapangan secepatnya dapat terealisasi oleh Pemko Medan. Semua kebijakan ada di tangan Pemko Medan, kita sifatnya hanya menyerap aspirasi, menampung aspirasi, tapi apa yang kita sampaikan Pemko Medan yang mengeksekusi. Harapan kita adalah apa yang disampaikan dalam Rapat Paripurna reses ini lebih cepat terealisasi", tandas Ikhwan Ritonga.

Rapat Paripurna ini ditutup dengan penyerahan Laporan Hasil Reses kepada Wakil Wali Kota Medan.





Komisi 3 DPRD Kota Medan:

“Tindak Tegas Kafe yang Melanggar Prokes dan Jam Operasional”

MEDAN - Terkait pengaduan warga mengenai keberadaan dan aktivitas kafe Pos Ambai Coffee di Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Komisi 3 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Lurah Sidorejo Hilir, Badan Kenaziran Masjid (BKM) Ikhwaniah, dan perwakilan warga, serta Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (LBH PB-PASU) sebagai kuasa hukum dari warga dan BKM Ikhwaniah, **Senin** (21/3/2022).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Muhammad Afri Rizki Lubis, S.M., M.I.P., selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, dan didampingi Anggota Komisi 3 lainnya.

Afri Rizki mengatakan bahwa RDP ini terkait adanya keluhan warga dan pihak BKM Ikhwaniah mengenai aktivitas kafe Pos Ambai Coffee yang mengganggu kenyamanan warga disekitar kafe tersebut.

"Adanya keluhan warga mengenai aktivitas yang meresahkan dari Pos Ambai Coffee, yang pertama mengenai prokes, dimana jam operasional kafe sampai jam 21.00 WIB, namun Pos Ambai Coffee ini buka sampai 24 jam dengan live music, tentu sangat mengganggu jam istirahat warga sekitar. Kemudian, adanya keluhan dari BKM Ikhwaniah yang terganggu jam ibadahnya dari aktivitas kafe tersebut. Kami dari Komisi 3 DPRD Kota Medan secepatnya akan melakukan sidak terkait pengaduan dan keluhan dari warga", kata Rizki.

Afri Rizki berharap kepada semua pelaku usaha kafe agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Kami berharap kepada pengusaha-pengusaha bukan hanya Pos Ambai Coffee, agar dapat menerapkan dan menjalankan prokes, dan untuk OPD terkait agar dapat menindak tegas pelaku usaha yang menyeleweng dari aturan", tambah Rizki.

Sementara itu, Anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan lainnya, Ir. Hendri Duin mengatakan antara pengusaha dengan pihak kelurahan harus bersinergi dan saling komunikasi.

"Antara pengusaha dengan pihak kelurahan harus bersinergi. Kuncinya harus ada komunikasi. OPD terkait juga harus proaktif dalam menegakkan prokes dan jam operasional, jangan hanya Pos Ambai Coffee saja yang ditindak tegas, tapi kafe-kafe lain juga harus patuh terhadap aturan", tandas Hendri Duin.



Percepat RANPERDA Zonasi PKL, PANSUS DPRD Kota Medan harapkan ada komunikasi yang baik antara Kecamatan dengan PUD Pasar

MEDAN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan, **Selasa** (22/03/2022).

Dalam Rapat Pansus ini, dihadiri oleh Direktur PUD Pasar Kota Medan, Kabag Hukum Setda Kota Medan, Camat se-Kota Medan dan OPD terkait lainnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Ir. Hendri Duin, selaku Ketua Pansus DPRD Kota Medan, didampingi oleh Anggota Pansus lainnya.

Hendri mengatakan lanjutan Rapat Ranperda ini adalah pemantapan data terakhir dari kecamatan.

"Jadi ini adalah pemantapan data terakhir dari kecamatan, memastikan bahwasannya data itu sudah final. Tapi kenyataannya masih ada beberapa kecamatan yang belum melaporkan datanya. Jadi kami kasih waktu selama satu minggu ini untuk memberikan datanya kembali. Selanjutnya nanti kita akan membahas pasal demi pasal dalam Ranperda ini", kata Hendri.

Hendri berharap harus ada komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dengan PUD Pasar Kota Medan.

"Kami berharap ini cepat selesai, artinya harus ada komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dengan PUD Pasar, data-datanya juga harus fix. Setelah itu nanti kita bukukan dalam satu buku hasil dari notulen-notulen yang akan kita lampirkan ke Wali Kota. Setelah itu kita bisa tau berapa ribu pedagang, lokasi mana yg kosong, jadi dapat kita relokasi agar tertata dengan baik", tandas Hendri.



Ketua DPRD Kota Medan: Aspirasi Masyarakat Harus Menjadi Perhatian Pemko Medan dalam Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2023

MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2023, **Rabu** (23/03/2022).

Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., yang diawali dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2023. Turut hadir dalam Musrenbang ini Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga, S.E., M.M., dan H. T. Bahrumsyah, S.H. M.H., Sekretaris DPRD Kota Medan, Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Kota Medan, unsur Forkopimda Kota Medan, Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, Camat se-Kota Medan, serta para pejabat tinggi lainnya.

Musrenbang yang mengusung tema "Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Infrastruktur untuk Menuju Medan Berkah yang Maju dan Kondusif" ini berlangsung selama 3 (hari) di Hotel Santika Dyandra Medan.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan bagian penting dari perencanaan untuk memperoleh sarana dan masukan serta klarifikasi terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. "Musrenbang pada tahun ini memiliki makna yang sangat penting karena merupakan penjabaran dari tahun ketiga RPJMD Kota Medan Periode 2021-2026 dan tahun kedua periode kepemimpinan kami", kata Bobby. "Dari forum ini kita harapkan lahir gagasan konstruktif guna memberi saran dan masukan yang sangat bermakna guna penyempurnaan RKPD Kota Medan Tahun 2023", harap Bobby.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan mengatakan bahwa Musrenbang ini bukan hanya rutinitas tahunan belaka, akan tetapi berfokus merumuskan berbagai program pembangunan dan pembenahan Kota Medan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan secara bottom up. "Melalui musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan, maupun melalui forum perangkat daerah untuk menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat, termasuk kegiatan reses DPRD yang telah dilaksanakan", kata Hasyim.

"Saya berharap hasil reses Anggota DPRD Kota Medan sebagai bagian dari menjangkau aspirasi masyarakat yang telah diparipurnakan dan dituangkan melalui pokok pikiran DPRD menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya melalui forum ini saya berharap sinergi antara DPRD dan Pemko Medan dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan semakin baik dan saling melengkapi untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan RKPD Kota Medan", tambah Hasyim.



MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RKPD KOTA MEDAN TAHUN 2023

Tema:

Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Infrastruktur
Untuk Menuju Medan Berkah Yang Maju dan Kondusif

23 - 25 Maret 2022

Santika Premiere Dyandra Hotel & Conve



Affi Nasution, S.E., M.M
Wakil Walikota Medan

H. Aulia Rachman, S.E
Wakil Walikota Medan



Bahrumisyah:

Berbagai Persoalan dan Keluhan Masyarakat dapat Menjadi Skala Prioritas dalam RKPD Kota Medan Tahun 2023

MEDAN - Memasuki hari kedua pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Medan Tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra Medan, Sekretaris DPRD Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P. memaparkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023, **Rabu** (24/3/2022)

Musrenbang ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. T. Bahrumisyah, S.H., M.H., dan Anggota DPRD Kota Medan, Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd.

Adapun empat bidang prioritas dalam pembahasan Musrenbang RKPD ini, yaitu Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sementara itu, Bahrumisyah mengatakan bahwa Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2023 ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi dari masyarakat.

"Selain dari hasil aspirasi-aspirasi masyarakat, terdapat juga pokok-pokok pikiran DPRD Kota Medan, yang diperoleh selama reses dan ditampung oleh dewan dan ini nanti akan disampaikan di dalam forum Musrenbang RKPD ini", kata Bahrumisyah.

"Kita dari DPRD Kota Medan ikut di dalam forum ini untuk memberikan masukan, kemudian untuk menyampaikan berbagai persoalan di Kota Medan, selanjutnya persoalan-persoalan ini akan kita jadikan sebagai program-program prioritas untuk dapat dilaksanakan di Tahun 2023", kata Bahrumisyah.

Wakil Ketua DPRD ini berharap Musrenbang RKPD ini dapat menghasilkan program-program unggulan berdasarkan skala prioritas, sebagaimana visi misi Pemerintah Kota Medan.

"Berbagai persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat kita jawab dan juga dapat kita selesaikan tentunya menurut skala prioritas termasuk juga dengan penganggarnya, itu yang paling penting". tandas Bahrumisyah.



MUSREMBANG RKPD Kota Medan 2023 Resmi Ditutup

MEDAN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2023 ditutup secara resmi oleh Wali Kota Medan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M, **Jumat** (25/03/2022).

Penutupan Musrenbang RKPD di Hotel Santika Dyandra Medan yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H.T. Bahrumsyah, S.H., M.H., dan Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P.

Musrenbang RKP ini ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2023 oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kota Medan yang merupakan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam sambutannya, Wiriya Alrahman mengatakan bahwa besaran anggaran tidak menjadi jaminan suksesnya program kegiatan tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dan hasil pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Semoga apa yang telah didiskusikan selama dua hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Medan", kata Wiriya.

"Saya berharap kiranya forum ini dapat meningkatkan kualitas kebersamaan seluruh pemangku kepentingan kota yang mendorong lahirnya kolaborasi antar pihak dan antar lembaga serta berperan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing", tandas Wiriya.

Penutupan Musrenbang RKPD ini diakhiri dengan foto bersama.





Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021



MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, **Senin** (28/03/2022).

Rapat Paripurna LKPJ ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga, S.E., M.M., H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H.

Turut hadir dalam rapat ini Wali Kota Medan yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., Anggota Dewan, dan segenap Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Medan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

Dalam sambutannya, Wiriya Alrahman mengatakan bahwa LKPJ ini merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Medan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Medan selama 1 (satu) tahun anggaran.

"LKPJ juga merupakan laporan dalam bentuk rangkuman keterangan pelaksanaan kebijakan, prioritas program dan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan kota selama tahun 2021. Oleh karenanya, penyampaian LKPJ ini kepada DPRD, merupakan salah satu strategis guna lebih mendukung pelaksanaan sistem demokrasi lokal dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus mendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin partisipatif, transparan dan berakuntabilitas", kata Wiriya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan bahwa LKPJ ini masih terbatas pada hal-hal berupa kinerja seluruh OPD di Tahun 2021.

"Hasil akhir dari pembahasan LKPJ bisa berupa rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan pada Wali Kota Medan terkait dengan kinerja dari masing-masing OPD di dalam pelaksanaan kegiatan pada anggaran 2021. Apakah sudah sesuai dengan apa yang tertuang APBD tahun 2021 atau tidak", kata Hasyim.

"Nanti rekomendasi-rekomendasi akan kami berikan kepada Wali Kota Medan, supaya nanti Wali Kota Medan bisa melakukan evaluasi terkait dengan kinerja dari masing-masing OPD untuk perbaikan kedepannya, misalnya ada yg kurang, tidak tepat sasaran, tidak sesuai prioritas. Selanjutnya apa yang dihasilkan di dalam APBD tahun 2021, harus dijadikan evaluasi perbaikan untuk tahun 2022", tandas Hasyim.

Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer Universitas Prima Indonesia



MEDAN - Dalam rangka mewujudkan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna memasuki dunia kerja, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer Universitas Prima Indonesia melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretariat DPRD Kota Medan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan, **Senin** (28/03/2022).

Acara penandatanganan perjanjian kerja sama ini dihadiri Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., Dekan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Dekan Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer Universitas Prima Indonesia, para pejabat di lingkungan Universitas Prima Indonesia, Para Kepala Bagian, serta Pejabat Fungsional/Subkoordinator di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.H.I., M.Hum., mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan kolaborasi dengan Sekretariat DPRD Kota Medan terkait dengan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat diwujudkan program-program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi", kata Elvira.

"Tentunya bukan hanya ditandatangani saja, tetapi kita nanti akan membuat implementasi, kita akan mengevaluasi perjanjian kerja sama ini minimal satu tahun sekali, agar terlihat wujud nyata dari kerja sama antara Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer dengan Sekretariat DPRD Kota Medan", tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk dukungan terhadap program-program pemerintah yaitu program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

"Kita berharap setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, kita harus secepatnya merealisasikan isi-isi dari perjanjian kerja sama tersebut. Tentunya dengan kerja sama ini akan menghasilkan ide-ide dan juga inovasi-inovasi yang bisa dituangkan di Sekretariat DPRD Kota Medan ini", kata Ali Sipahutar.

Perjanjian kerja sama ini ditutup dengan pemberian cenderamata dan foto bersama.





Rapat Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2021

MEDAN - Menindaklanjuti Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Medan Tahun Anggaran 2021, DPRD Kota Medan menggelar Rapat Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2021, **Selasa** (29/03/2022).

Rapat Pansus Pembahasan LKPJ yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga, S.E., M.M., dihadiri 14 (empat belas) Anggota Pansus, baik secara fisik maupun virtual.

Hasil rapat Pansus LKPJ ini, terpilih secara aklamasi Haris Kelana Damanik, S.T., sebagai Ketua Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2021, dan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., sebagai Wakil Ketua.

Dalam wawancaranya, Ikhwan Ritonga mengatakan bahwa rapat ini merupakan pemilihan Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2021 dengan tujuan mengetahui kinerja OPD selama tahun 2021.

"Pembahasan LKPJ ini merupakan pembahasan kinerja dari program OPD selama tahun 2021. Lewat pembahasan LKPJ ini akan ada hasil-hasil yang bisa kita nilai, sehingga nanti teman-teman anggota dewan bisa menyampaikan ke Wali Kota untuk evaluasi berikutnya terkait program-program OPD selama 2021", kata Ikhwan.

"Harapan kita, semoga Wali Kota bisa menindaklanjuti dari hasil pembahasan LKPJ ini. Disini nanti akan ada temuan-temuan ataupun ada evaluasi dari teman-teman Pansus. Mereka akan melihat lebih detail, bagaimana program yang sudah dianggarkan di 2021, bagaimana realisasinya, bagaimana pertanggungjawabannya, sebagai perbaikan dan evaluasi sehingga pembangunan Kota Medan lebih bersinegri untuk tahun ke depannya", tandas Ikhwan.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan



Sekretaris DPRD Kota Medan :

*Apapun Rintangannya ke depan,
Jika Kita Bersama Pasti Bisa*



MEDAN - Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan apel pagi dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap Negara dan rakyat Indonesia, serta untuk menumbuhkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Medan serta menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B/392/M.KT.02/2021 tanggal 30 Desember 2021 terkait Himbauan Apel Pagi di lingkungan Instansi Pemerintah, **Senin** (17/01/2022).

Apel pagi ini langsung dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota Medan M. Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., dan diikuti oleh para Kepala Bagian, Pejabat Fungsional serta jajaran ASN yang bertugas di Sekretariat DPRD Kota Medan.

Ali Sipahutar mengatakan bahwa untuk seluruh ASN di Sekretariat DPRD Kota Medan agar dapat mencapai angka kredit yang telah ditargetkan.

"Angka kredit yang telah ditetapkan ke dalam SK (Surat Keputusan) ASN harus bisa dicapai sesuai dengan angka kredit yang telah ditargetkan", kata Ali Sipahutar.

Ali Sipahutar juga mengingatkan agar seluruh ASN dapat saling berkoordinasi dalam menjalankan program-program kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan.

"Saya berharap untuk ke depannya agar setiap pekerjaan harus saling koordinasi sebelum mengambil suatu keputusan agar kami tahu program-program apa saja yang belum dan yang telah tercapai", kata Ali Sipahutar.

Sebagai penutup, Ali Sipahutar juga memberikan motivasi kepada seluruh ASN Sekretariat DPRD Kota Medan dalam menghadapi segala rintangan pekerjaan.

"Apapun rintangan ke depan kalau kita bersama pasti akan dapat kita hadapi", tutup Sekretaris DPRD Kota Medan.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

**SELAMAT
HARI RAYA
IDUL FITRI
1443 H**

Mohon Maaf Lahir & Batin



Hasyim, S.E.
Ketua DPRD Kota Medan



H. Ihwan Ritonga, S.E.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan



H. Rajudin Sagala, S.Pd.I
Wakil Ketua DPRD Kota Medan



H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H
Wakil Ketua DPRD Kota Medan